



SUMBER BERITA

RABU, 15 JANUARI 2020

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Perda Pasar Prioritas Utama

**BPK Catat Potensi
PAD Hilang Rp 1,3 M**

BENGKULU - Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi mengatakan, saat ini DPRD Kota Bengkulu menjadikan penyelesaian pembahasan Raperda Pasar menjadi prioritas utama di tahun 2020 ini. Seiring dengan temuan audit BPK yang mencatat "Perda ini sudah masuk dalam pembahasan kita dan sudah siap, hanya menunggu draf dan jadwal pembahasannya kapan," ungkapnya.

Kemarin (14/1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja Pemkot Bengkulu sejak tahun 2017 hingga semester satu tahun 2019. Dalam catatan BPK potensi kehilangan PAD ini atas pemanfaatan sejumlah aset daerah tahun 2017. BPK melihat Potensi Kehilangan PAD Rp 1,3 ini, disebabkan Pemkot masih lemah dalam pengelolaan pasar. Hal ini berdasarkan pemeriksaan BPK ke Pasar Panorama, Pasar Minggu, dan Pasar Baru Koto.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Aryo Seto menjelaskan, pertama Pemerintah Kota belum memiliki Perda pengelolaan pasar dan peraturan turunannya berupa peraturan walikota. Serta prosedur operasional standar, sebagai pedoman pengelolaan pasar. selain itu peraturan terkait retribusi tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi serta belum dimutakhir sejak tahun 2013, kedua Kelembagaan pengelolaan pasar belum mendukung pemanfaatan pasar.

"Ketiga Disperindag Kota belum mendukung strategi kepala daerah merevitalisasi pasar tradisional ke dalam dokumen perencanaan dan turunnya, sampai dengan kegiatan yang memiliki kinerja yang jelas dan terukur. Ke empat OPD dan UPTD terkait pengelolaan pasar belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk pengelolaan pasar," ujarnya

Kemudian Kelima, peraturan terkait pasar belum lengkap dan diterapkan seluruhnya hingga terdapat kehilangan potensi pendapatan, terakhir kegiatan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut belum memadai dan optimal.

"Apabila permasalahan-permasalahan ini tidak dilanjutkan oleh kepala daerah, maka

ada potensi kehilangan PAD dari sektor pengelolaan aset Rp 1,3 miliar. Salah satunya lantaran Pemkot masih lemah dalam pengelolaan pasar. Ini dikarenakan Pemkot belum memiliki Perda Pasar dan produk turunannya. Bukan hanya itu, Mirliadi juga mengatakan seluruh Raperda yang berhubungan dengan peningkatan PAD akan dikejar untuk diselesaikan semuanya.

☞ Baca **PERDA....** Hal 19

dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD," ungkapnya.

Maka dari itu, Pemkot diminta untuk segera menyelesaikan semua permasalahan ini. Yang harus dibenahi oleh Pemkot, yang paling penting itu adalah Perda. Karena dari 2013 yang lalu sampai sekarang itu belum selesai. "Harapan kita Perda pengelolaan pasar ini harus segera diselesaikan. Agar Potensi PAD yang ada di Kota Bengkulu tidak hilang," jelasnya.

Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengungkapkan, setelah menerima hasil pemeriksaan ini, dirinya akan segera memanggil OPD terkait dalam pengelolaan pasar, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. "Sebenarnya Pemkot saat ini sudah melakukan penataan ulang di sektor pasar, terhambat dikarenakan langsung bersentuhan dengan warga yang ingin mencari mata pencaharian," tutup Helmi. (jee)